

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus pada Kantor BPKAD Kota Palopo)**

Anita Daun Lamba

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palopo
e-mail : anitadaun6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan *Value for money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di BPKAD Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kepala BPKAD, Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *simple random sampling* dengan 53 responden. Metode pengumpulan data yaitu survey dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala likert. Analisis pengaruh variabel menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan *value for money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *value for money* dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of government accounting standards and value for money on the accountability of regional financial management. This research was conducted at BPKAD Palopo City. This research is a research with a quantitative approach. The data used are primary data. Respondents in this study were all employees at the Palopo City BPKAD office who were directly involved in regional financial management, namely the Head of BPKAD, the Secretariat, the Budget and Treasury Division, the Regional Assets Division and the Accounting Division. The determination of the sample in this study was carried out using the Slovin formula. The sampling method used was method simple random sampling with 53 respondents. The data collection method is a survey using a questionnaire distributed to respondents. Scale of data measurement with Likert scale. Analysis of the influence of variables using multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate the effect of implementing government accounting standards and value for money has a significant and positive effect on the accountability of regional financial management.

Keywords: *Application of Government Accounting Standards, value for money, and accountability of regional financial management*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memberlakukan bentuk pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang ditandai dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota dituntut dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Purba (2018), Pemerintah daerah dapat menyesuaikan

pembangunan daerah sesuai dengan potensi keuangan daerah masing-masing.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan negara tahun 2003, presiden, gubernur, dan walikota wajib memuat paling sedikit laporan keuangan pada neraca, laporan realisasi APBN/APBD, laporan arus kas, dan

informasi mengenai hal-hal berikut ini, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk catatan laporan keuangan. Kemudian pada tahun 2014 Undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah menetapkan bahwa salah satu tujuan pemerintah daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tugas nyata mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dibutuhkan penanggungjawab masing-masing daerah atau penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah harus mencantumkan pernyataan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Darise dalam Hasanah, 2019). Akan tetapi diperlukan juga variabel independen seperti penerapan standar akuntansi pemerintah dan *Value for money* sehingga apabila konsep ini berjalan dengan demikian tujuan variabel akan terlaksana dengan baik. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pengetahuan yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Keharusan dan tuntutan pertanggungjawaban pelaporan keuangan daerah menggambarkan pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan agar penilaian kinerja pemerintah daerah seragam, hal ini juga menuntut pejabat pemerintah terkait untuk menanggapi dengan serius dan membuat komitmen untuk menulis bagi yang membutuhkan atau berminat.

Pemerintahan Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang telah mendapatkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sejak tahun 2016-2019, pemerintah kota palopo memperoleh predikat tersebut dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk keempat kalinya

secara berturut-turut (<https://radarluwuraya.com>, 2019). Predikat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menjadi salah satu tolak ukur, untuk mengukur apakah kinerja keuangan pemerintah kota palopo memenuhi standar. Publik mempersepsi bahwa opini WTP mencerminkan penggunaan keuangan yang benar, padahal berulang kali BPK mengingatkan bahwa lembaga yang mendapatkan opini WTP tidaklah dijamin bebas dari korupsi. Opini WTP hanya sekedar pernyataan BPK terhadap suatu pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan tiap-tiap lembaga. Namun masih banyak daerah yang sudah meraih opini WTP tetapi banyak ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah dikutip dalam (<https://www.wcnbcindonesia.com>, 2019) oleh karena itu peneliti mengambil objek pada Kantor BPKAD Kota palopo.

Agar semua pelaksana keuangan daerah mampu mengelola keuangan harus memahami standar akuntansi, oleh sebab itu pengelola keuangan mengenai standar akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Berdasarkan fenomena diatas dan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Value For Money Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Palopo (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kota Palopo)**”

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apakah *Value For Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Apakah Penerapan Standar akuntansi pemerintah dan *Value for money* berpengaruh secara simultan atau parsial terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan pada tingkah laku dan premis oleh Donaldson & Davis, 1991. *Stewardship theory* adalah situasi yang menggambarkan dimana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan pribadi, tetapi diarahkan pada tujuan utama organisasi dan diarahkan pada hasil utamanya. Karena itu, teori memiliki dasar sosiologi dan psikologis, dan tujuan rancangannya adalah untuk memotivasi para eksekutif sebagai manajer untuk bertindak sesuai dengan keinginan atasan. Selain itu, perilaku tidak akan meninggalkan organisasi karena pengurus akan berusaha keras mencapai tujuan organisasinya. Keberhasilan organisasi menggambarkan efektivitas maksimal dari tim manajemen.

Teori *Stewardship* telah muncul di bidang tata kelola perusahaan sebagai alternatif teori keagenan, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi teori agensi. Dalam hal ini, perbedaan utama antara teori agensi dan *stewardship* terletak pada mekanisme pengelolaan resiko: teori keagenan mempromosikan mekanisme kontrol yang mengakibatkan biaya baru muncul lagi sementara teori *stewardship* mempromosikan pengembangan kepercayaan (Davis *et al*, 1997).

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah dapat menafsirkan tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan memberinya tanggungjawab keuangan, sehingga menjelaskan bahwa pemerintah daerah (pengelola) dapat dipercaya dan sejalan dengan kepentingan umum. Keberadaan institusi, masyarakat dapat merealisasikan dengan baik (Lewier, 2016). Melalui laporan keuangan yang dilaporkan pemerintah yang mempertanggungjawabkan kinerjanya, masyarakat dapat mengevaluasi, mengukur, dan memantau sejauh mana pemerintah daerah mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya (Kurniawati 2016).

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi sangat penting sebagai standar dan mekanisme kontrol dalam penyusunan laporan keuangan. Kurangnya standar akuntansi yang tepat akan berdampak negatif berupa rendahnya reliabilitas dan sulitnya pengendalian informasi keuangan (Mardiasmo, 2007). Jika organisasi memahami standar atau opini seperti halnya pembuat laporan keuangan, maka pengguna laporan keuangan eksternal organisasi akan dapat memahami informasi yang diberikan (Abdul Halim, 2012: 225). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud Penerapan Standar akuntansi pemerintah adalah: Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pusat guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini harus dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Penerapan standar akuntansi pemerintah
Menurut Weskornis (2018), penerapan standar akuntansi pemerintahan mengharuskan semua organisasi yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait memiliki pemahaman yang utuh. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, namun dalam penerapannya perlu dipahami beberapa alasan penting sehingga diharapkan dapat membantu penerapan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang tepat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pertanggungjawabannya keuangan daerah merupakan penentu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangannya pemerintah (Mahmudi, 2011:271).

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009: 27), standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada dasarnya mengatur tiga hal sebagai berikut: Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

Value For Money

Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai sarana inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (Sayuti, 2018). Menurut Mardiasmo (2009: 127) *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari keluaran yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan masukan, keluaran dan hasil bersama-sama. Indra (2006: 280) menyatakan bahwa *value for money* merupakan tolak ukur dalam anggaran untuk organisasi sektor publik. Menurut Mahsun (2006: 132), *value for money* merupakan ukuran kinerja yang didasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *value for money* merupakan penerapan dari tiga konsep pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan dan sektor publik yaitu ekonomis, efisien dan efektif.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009, 4) *value for money* merupakan konsep prinsip-prinsip manajemen organisasi sektor publik yang fundamental terhadap tiga elemen utama, yaitu: Ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah akuntabilitas kepada publik atau setiap aktivitas yang dilakukan. Menurut Nordiawan (2008) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas Menurut Bastian (2010) dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pemimpin kolektif atau

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan adalah kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan atau menjelaskan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Menurut Wahida (2015) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan terdiri dari: Akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses. Akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivis, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, biasanya teknik pengambilan sampel secara acak, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dan tujuannya untuk menguji hipotesis berikut: kelompok. Filsafat positivisme percaya bahwa realitas / gejala / fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap, spesifik, teramati, terukur dan sebab akibat. Penelitian biasanya dilakukan pada populasi atau sampel yang representatif (Sugiyono, 2013).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di Jl. Jend Sudirman No.163, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian ± 2 (Dua) bulan terhitung mulai dari bulan Juli hingga Agustus 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan

daerah yaitu Kepala BPKAD, Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi sebanyak 112 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Pengambilan sampel digunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana untuk pengambilan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

(1)

Dimana:

n : Ukuran sampel

N: Ukuran populasi

e : Persentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diujikan, untuk penelitian ini digunakan 10%.

Persentase kelonggaran ketidakteelitian menggunakan 10% karena dari hasil yang

didapatkan sudah mewakili populasi. Maka besarnya sampel dalam penelitian ini, adalah:

$$n = \frac{112}{1+112 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{112}{1+1,12}$$

$$n = 52.83$$

Dari hasil perhitungan sampel diatas, maka dapat diketahui jumlah sampel yang harus digunakan dalam penelitian ini yaitu 53 (dibulatkan) yang berperan dalam kantor BPKAD Kota Palopo.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana:

n : Ukuran sampel

N: Ukuran populasi

e : Persentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diujikan, untuk penelitian ini digunakan 10%.

Persentase kelonggaran ketidakteelitian menggunakan 10% karena dari hasil yang

didapatkan sudah mewakili populasi. Maka besarnya sampel dalam penelitian ini, adalah:

$$n = \frac{112}{1+112 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{112}{1+1,12}$$

$$n = 52.83$$

Dari hasil perhitungan sampel diatas, maka dapat diketahui jumlah sampel yang harus digunakan dalam penelitian ini yaitu 53 (dibulatkan) yang berperan dalam kantor BPKAD Kota Palopo.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu berupa jawaban dari responden terhadap pernyataan yang terdapat dikuesioner yang dibagikan dan dikumpulkan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo. Adapun sumber data dari artikel, jurnal, skripsi, dan tesis yang diterbitkan dan dipublikasikan serta melalui buku yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui:

Observasi, Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013). Kuesioner (*questionnaire*), Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden auditor. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dijawab dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2012).

Kuesioner yang digunakan adalah model skala *likert*. Kuesioner tersebut

berisi pernyataan-pernyataan dan responden harus menjawab dengan alternatif jawaban yang disediakan mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan skor dari 1 sampai 5. Berikut ini adalah kelima alternatif jawaban tersebut:

1. Sangat Setuju (SS) = 5
2. Setuju (S) = 4
3. Kurang Setuju (KS) = 3
4. Tidak Setuju (TS) = 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase %
1.	Distribusi Kuesioner	53	100%
2.	Kuesioner Kembali	45	85%
3.	Kuesioner Yang Tidak Kembali	8	18%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	45	85%
n sampel yang kembali = 45			
Responden rate = $\frac{45}{53} \times 100\%$			
= 85%			

Sumber: Data yang diolah (2020)

Deskriptif statistik

Uji validitas data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment*

Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kota Palopo. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada Kantor BPKAD sebanyak 53 eksamplar dan diberikan pada pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 45 eksamplar, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 85%. Adapun rincian dapat dilihat:

person correlation. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai item dari *corrected Item-Total Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	X1.1	0,635	0,294	Valid
	X1.2	0,816	0,294	Valid
	X1.3	0,727	0,294	Valid
	X1.4	0,740	0,294	Valid
	X1.5	0,858	0,294	Valid

	X1.6	0,666	0.29 4	Valid
	X1.7	0,817	0.29 4	Valid
	X1.8	0,434	0.29 4	Valid
	X1.9	0,813	0.29 4	Valid
	X1.1 0	0,713	0.29 4	Valid
Value For Money	X2.1	0,776	0.29 4	Valid
	X2.2	0,765	0.29 4	Valid
	X2.3	0,770	0.29 4	Valid
	X2.4	0,860	0.29 4	Valid
	X2.5	0,853	0.29 4	Valid
	X2.6	0,300	0.29 4	Valid
	X2.7	0,587	0.29 4	Valid
	X2.8	0,906	0.29 4	Valid
	X2.9	0,755	0.29 4	Valid
	X2.1 0	0,722	0.29 4	Valid
	Akuntabilita s Pengelolaan Keuangan Daerah	Y.1	0,722	0.29 4
Y.2		0,776	0.29 4	Valid
Y.3		0,563	0.29 4	Valid
Y.4		0,846	0.29 4	Valid

	Y.5	0,744	0.29 4	Valid
	Y.6	0,807	0.29 4	Valid
	Y.7	0,847	0.29 4	Valid
	Y.8	0,817	0.29 4	Valid
	Y.9	0,758	0.29 4	Valid
	Y.10	0,682	0.29 4	Valid
	Y.11	0,736	0.29 4	Valid

Sumber : Data diolah diSPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation* dari r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

Uji realibilitas data

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator

Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)	0,900	0,60	Reliabel
Value For Money (X_2)	0,901	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,928	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* dari variabel total lebih besar dari 0,60, sehingga cocok digunakan sebagai alat ukur alat angket dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

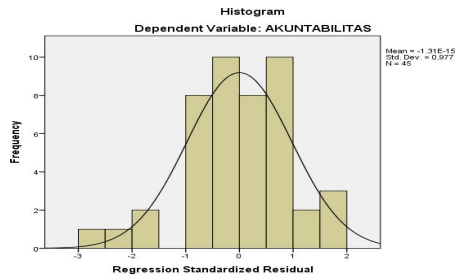
Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan

variabel. Jika jawaban responden tetap stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan. Untuk mengukur nilai reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika *Conbach Alpha* yang dibangun > 0,60, maka dinyatakan reliabel.

menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.

Grafik di atas menunjukkan bahwa **distribusi penyebaran residual yang normal**, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan

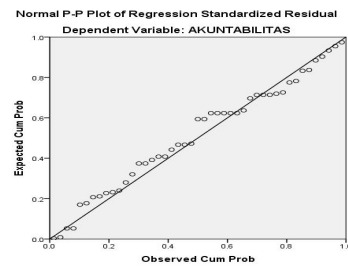
menggunakan grafik normal plot dibawah ini:



Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau

lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.



Gambar 4.3 Grafik Plot Uji Normalitas

Uji multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas.

Tabel 4.8 Uji *Multikolonieritas*

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	3.515	4.457	.789	.435		
	Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	.536	.159	3.369	.002	.385	2.596
	Value For Money (X ₂)	.498	.134	3.719	.001	.385	2.596

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)

Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah >0,100. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,385 dan variabel *Value For Money* sebesar 0,385. Sehingga nilai

tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus >0,100. Sedangkan untuk standar akuntansi pemerintahan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah 2.596 dan *value for money* sebesar 2.596. Oleh karena itu, nilai ini juga memenuhi persyaratan lain

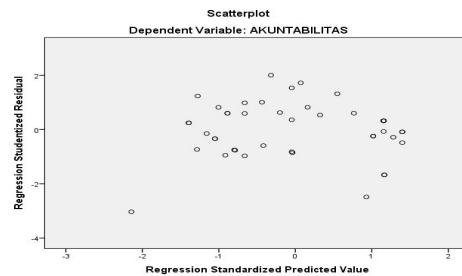
dari uji poliklonal ini, yaitu nilai VIF harus kurang dari 10.000. Karena itu, kita bisa mengambil kesimpulannya **adalah tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.**

Uji heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa **tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.**

homoskedastisitas. Berikut hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*.



Gambar 4.4 Uji *Heteroskedastisitas*

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3.515	4.457		.789	.435
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	.536	.159	.431	3.369	.002
Value For Money (X ₂)	.498	.134	.476	3.719	.001

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X₁ (Penerapan standar akuntansi pemerintah) sebesar 0,536 dan koefisien variabel bebas X₂ (*Value for money*) sebesar 0,498. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = 3,515 + 0,536 x_1 + 0,498 x_2 + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis Uji koefisien determinasi adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R² dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi Adjusted R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.857 ^a	.735	.722	2.60538	1.781

a. Predictors: (Constant), Value for money, Penerapan standar akuntansi pemerintah

b. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan (y)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh Adj. R² dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,722. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari penerapan standar akuntansi dan *value for money* terhadap variabel dependen

Hasil uji parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 72,2% sedangkan sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

individual dalam menerangkan variabel dependen

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standard Coefficients	T	Sig.
	B	Std.	Beta		
1 (Constant)	3.515	4.457		.789	.43
Standar akuntansi pemerintah	.536	.159	.431	3.36	.00
Value Money	.498	.134	.476	3.71	.00

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y)

Hasil uji simultan (Uji f)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Simultan (Uji f)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	790.148	2	395.074	58.202	.000 ^b
	Residual	285.096	42	6.788		

Total	1075.244	44			
-------	----------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

b. Predictors: (Constant), Valueformoney, Standar akuntansi Pemerintah

Pada tabel 4.13 di atas dapat dilihat nilai F sebesar 58,202 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain bahwa, **penerapan standar akuntansi pemerintah dan *value for money* secara bersama- sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.**

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis pertama penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi (β_1) sebesar 0,536 dan memiliki nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana teori ini menjelaskan dapat menafsirkan tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan memberinya tanggungjawab keuangan, sehingga menjeskan bahwa pemerintah daerah (pengelola) dapat dipercaya dan sejalan dengan kepentingan umum. Hubungan teori *stewardship* dengan standar akuntansi pemerintah ialah apabila standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, maka akan berdampak pada penerapan standar keuangan pemerintah yang semakin baik dan kemampuan laporan keuangan pemerintah akan lebih berkualitas, dan akan berkali-kali. Mendapatkan opini

audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan pemerintah menjadi jelas dan lengkap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2017) dan Zeyn (2011) yang berpendapat bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah telah mampu untuk menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran, serta selalu mengoreksi setiap kesalahan dalam penyajian laporan keuangan sehingga ini menjadi bukti dari Kota Palopo yang sudah empat kali memenangkan WTP dari BPK atas pertanggungjawabannya dalam mengelola laporan keuangan.

Pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis kedua penelitian ini adalah untuk menguji apakah *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Palopo. Hal ini terlihat dari uji hipotesis, koefisien regresi (β_2) sebesar 0,498, dan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *value for money* akan meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. *Value for money* terkait dengan tolok ukur dalam anggaran organisasi sektor publik.

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan dimana para manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan pribadi, tetapi diarahkan pada tujuan utama organisasi dan diarahkan pada hasil utamanya. Pemerintah daerah sudah mampu menerapkan konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya publik yang dimiliki untuk mempertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurut Mahsun (2006: 132)

value for money adalah evaluasi kinerja yang didasarkan pada ukuran ekonomi dan efisiensi. Dan efektivitas. Secara khusus, pemerintah daerah telah mampu menggunakan aspek ini dalam pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya publik yang akuntabel kepada publik. Penerapan konsep *value for money* dalam proses penggunaan anggaran dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan aspek efektif penggunaan anggaran sejalan dengan visi, dan misi sasaran manfaat dapat tercapai sesuai dengan tujuan kepentingan

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka pengujian dan pembahasan hipotesis yaitu Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *value for money* terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis pertama diterima.
2. *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis kedua diterima.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pernyataan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.
2. Peneliti hanya menggunakan dua variabel independen untuk mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

masyarakat, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primayani (2014) dan Shinta (2017) yang meyakini bahwa *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi sektor publik dengan kinerja biaya tinggi akan menghasilkan target output yang baik.

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sampel yang lebih banyak.
2. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja tetapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.
3. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16 June 1991, 49–66.
- Hasanah, Y. A., Sasongko, N., & Bawono, A. D. B. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Di Pemerintah Kabupaten

- Sukoharjo). *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*, 9(5). <https://radarluwuraya.com>, 2019
- <https://www.cnbcindonesia.com>, 2019)
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Kurniawati, Maria Magdalena Hesti. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Jember.
- Lewier, Christy Natalia. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Skripsi: Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Yogyakarta: Andi
- Nunuy Nur Afiah. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pramudita, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Value*
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Cetakan Ketujuh Belas. Alfabeta. Bandung.
- For Money* Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Primayani, Putu Riana, et al.,. 2014. Pengaruh Pengendalian Internal *Value For Money* Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung). *E-Jurnal S1 Ak* Vol.2, No.1. Universitas Pendidikan Ganesha
- Purba R, B (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*. Vol 8 (1).
- Sayuti. 2018. Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Bappeda Kabupaten Gowa. Skripsi. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Shintia A,E (2017) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah , Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi EMPIRIS Pada SKPD Kabupaten Kudus). Skripsi . Universitas Muria Kudus.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan kedua Puluh Sembilan. Alfabeta. Bandung.
- Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan daerah dan
perubahannya. Visimedia Pustaka
- Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian
Laporan Keuangan Daerah dan
Aksesibilitas Laporan Keuangan
Daerah Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Utara. Skripsi.
Makassar. Universitas Hasanuddin
Makassar.
- Wardana, Ibnu. 2016. Akuntabilitas Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa (Studi
Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten
Magelang). Skripsi. Semarang.
Universitas Negeri Semarang.
- Weskornis R,T,J (2018). Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Dan Kompetensi
Aparatur Pemerintah Daerah
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Survey Pada Dinas- Dinas
Kabupaten Kuningan). Skripsi.
Universitas Pasuruan Bandung.
- Zeyn E (2011) Pengaruh *Good Governance*
Dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Dengan Komitmen Organisasi
Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu
Akuntansi Dan Keuangan. Vol.1 No.
(1). Universitas Pasundan Bandung,
Jawa Barat.